

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN ALAT DAN
OBAT KONTRASEPSI (STUDI KASUS PADA PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PROVINSI JAMBI)**

Elsa Vijayanti S¹⁾

Yudi²⁾

Andi Mirdah³⁾

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3} Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: vijayantielsa@gmail.com¹, yudi.fe@unja.ac.id², andi.mirdah@unja.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the internal control of contraceptive supplies and drugs in the Jambi Province BKKBN representative according to Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems. The sampling technique used was purposive sampling. The sample used in this study amounted to 60 respondents. This type of research is descriptive quantitative. The results showed that the average value of internal control of contraceptive supplies and drugs in the BKKBN (National Population and Family Planning Agency) Jambi Province was 91.734%. The average score of internal control for contraceptive tools and drugs at the BKKBN Jambi Province representative was in the very suitable category (76% - 100%) based on the Guttman scale assessment criteria by Campion (1990). These results indicate that the level of internal control for contraceptive tools and drugs at the BKKBN Jambi Province representative is in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 concerning SPIP.

Keywords: Internal Control, Control Environment, Risk Assessment, Information and Communication, Control Activities, Supervision and Monitoring

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi di perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jambi sebesar 91,734%. Skor rata-rata pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi masuk dalam kategori sangat sesuai (76% - 100%) berdasarkan kriteria penilaian skala Guttman

oleh Campion (1990). Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi sudah sangat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Kata Kunci: Pengendalian Intern, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Pengendalian, Pengawasan Dan Pemantauan

1. PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Saat ini penduduk Indonesia kurang lebih berjumlah 264 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,1 % setiap tahunnya. Lajunya tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk akan mempengaruhi tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, pemerintah mencanangkan program kependudukan dan keluarga berencana sebagai program nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan penekanan jumlah angka kelahiran dengan pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tugas pokok dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Salah satu fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam melakukan upaya pengendalian kuantitas dan menyelenggarakan keluarga berencana adalah melakukan advokasi dan koordinasi, serta menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana (Perka BKKBN No. 72/2011 Pasal 3). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang dipandang paling efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Alat dan obat kontrasepsi merupakan salah satu bagian penting yang digunakan sebagai instrumen dalam pelayanan Keluarga Berencana. Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi merupakan faktor penting yang ikut menentukan kesuksesan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menjalankan program KB. Dengan mengelola alat dan obat kontrasepsi, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat terjangkau sehingga pelaksanaan program KB dapat berjalan.

Proses pengelolaan obat dan alat kontrasepsi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen logistik yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pencatatan pelaporan. Tugas dan fungsi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi salah satunya adalah mengelola alat dan obat kontrasepsi di tingkat Provinsi dan mempunyai peran penting dalam menjaga ketersediaan, proses distribusi hingga tahap pemusnahan alat dan obat kontrasepsi.

Nilai persediaan alat dan obat kontrasepsi yang material sebesar Rp 3,6 miliar membutuhkan pengendalian intern yang baik atas aset persediaan. Fenomena pengendalian intern atas persediaan tahapan pelaporan adalah ditemukan kekeliruan input data pada Bulan November 2019. Kekeliruan tersebut berupa kesalahan pengetikan data kuantitas obat. Saldo akhir persediaan pil KB pada akhir Oktober 2019 berjumlah 443.300 pil. Angka ini keliru diinput pada awal November 2019 menjadi 4.433.300. Kesalahan ini menyebabkan jumlah persediaan pil KB terlalu tinggi sebanyak 3.990.000 (Laporan Bulanan Alat dan Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jambi). Kondisi ini menimbulkan adanya kelemahan pada unsur pengendalian intern informasi dan komunikasi terkait pelaporan nilai persediaan, sehingga nilai sediaan obat dan alat kontrasepsi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Fenomena penelitian atas persediaan berdasarkan hasil wawancara dengan petugas gudang alokon diperoleh informasi bahwa BKKBN Provinsi Jambi menerima dropping alat obat kontrasepsi (alokon) dari BKKBN pusat tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan (kab/kota) sehingga terjadi penumpukkan alokon digudang yang dapat mengakibatkan alokon menjadi kadaluarsa

Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan peneliti di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi diketahui bahwa belum ada pelatihan khusus bagi petugas gudang, adapun petugas gudang ditunjuk secara langsung berdasarkan hasil rapat pimpinan dan baperjakat internal Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Provinsi. Pada saat ini jumlah pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dipandang belum dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang diperlukan, yang mana hal ini salah satunya disebabkan banyaknya personil atau pegawai yang mengalami purna bakti (pensiun) sedangkan penggantinya tidak tersedia. Hal ini juga mengakibatkan beberapa jabatan terpaksa dilakukan rangkap oleh satu orang pegawai dan bahkan ada beberapa kepala sub bagian yang tidak memiliki staf sehingga pekerjaan dilakukan sendiri dan mengakibatkan beban kerja hanya mampu bertumpu pada satu orang saja. Disisi lain kompetensi yang dimiliki pegawai juga belum memenuhi criteria yang dibutuhkan karena masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan yang tidak mendukung. Demikian pula halnya dengan petugas pengelola gudang alkon yang juga merangkap tugas sebagai pengelola anggaran. Kondisi ini tidak sesuai dengan unsur pengendalian intern terkait dengan pemisahan tugas karyawan dan kompetensi pegawai yang cakap untuk posisi yang tepat.

Penelitian tentang pengendalian intern telah dilakukan oleh peneliti – peneliti lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2016) menganalisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Obat Di Rumah Sakit Anak Astrini Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern persediaan obat di Rumah Sakit Anak Astrini Wonogiri sudah efektif. Namun diketahui masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian dan penerimaan obat sehingga kemungkinan terjadi kecurangan atau kesalahan cukup besar.

Penelitian Arini, dkk (2015) menganalisis Pengendalian Intern Terhadap Persediaan Obat Untuk Pasien Pengguna Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Di Rsud (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pengendalian intern terhadap persediaan obat untuk pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng secara keseluruhan sudah efektif.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Maruf, dkk (2019) yang menganalisis Pengendalian internal atas Persediaan Obat Pada Organisasi Sektor Publik di Puskesmas Bahu . Hasil penelitian Maruf, dkk (2019) Menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apotek Puskesmas Bahu telah menerapkan sebagian besar pengendalian internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization).

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian Maruf, dkk (2019) yaitu pertama, persediaan yang diteliti Maruf, dkk (2019) merupakan persediaan obat di Puskesmas Bahu, sedangkan penelitian ini menganalisis pengendalian persediaan obat dan alat kontrasepsi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi. Perbedaan kedua yaitu subjek penelitian, dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi sementara Maruf (2019) di Apotek Puskesmas Bahu. Perbedaan ketiga yaitu terletak pada tahun penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang penelitian, fenomena, dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengendalian Intern Persediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi)”.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015).

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan Negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum (Sujarweni, 2015).

Sektor Publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang/jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan Negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan (I Gusti Agung Rai 2008). Dilihat dari segi kegiatan sektor publik adalah seluruh kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, baik dari hasil pungutan pajak, maupun penerimaan negara lain-lain, termasuk yang bersumber dari utang

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga- lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya (Sujarweni, 2015).

2.3. Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan kegiatan agar tujuan dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala peraturan yang berlaku (Rahayu, dkk 2016).

2.4. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1. Pengendalian internal diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
2. Informasi akuntansi tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
3. karyawan telah menaati hukum dan peraturan

2.5. Keterbatasan Pengendalian Intern

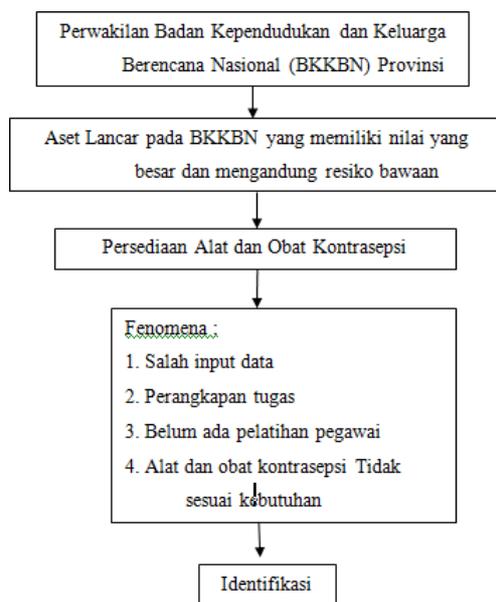
Faktor manusia adalah faktor yang sangat penting sekali dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karna adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh.

Kolusi juga secara signifikan dapat mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Belum lagi adanya pandangan umum yang mengatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang begitu sempurna, termasuk sistem pengendalian internal yang dijalankan.

2.6. Persediaan

Menurut SAP No. 71 tahun 2010 persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Indonesia menempati peringkat ke-4 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti, padatnya pemukiman dan tidak seimbangya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial lainnya. Oleh karna itu pemerintah membentuk suatu Badan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun BKKBN memiliki tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Salah satu program BKKBN yaitu Keluarga Berencana (KB) yaitu program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan penambahan penduduk di suatu Negara dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi. BKKBN Provinsi Jambi memiliki persediaan alat dan obat kontrasepsi yang mencapai milyaran rupiah dan nilai nominal yang cukup besar ini membutuhkan suatu pengendalian intern yang cukup baik dikarnakan persediaan ini merupakan aset lancar yang dimana persediaan ini memiliki resiko seperti hilang dan rusak, oleh karena itu dibutuhkan suatu pengendalian intern yang baik untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan alat dan obat kontrasepsi.

Adapun fenomena yang terjadi meliputi adanya kesalahan input nilai kuantitas persediaan, adanya perangkapan tugas sehingga pemantauan kurang efektif, pegawai petugas alat dan obat kontrasepsi tidak diberikan pelatihan-pelatihan khusus dalam mengelola alat dan obat kontrasepsi yang baik dan masalah lainnya adalah alat dan obat kontrasepsi yang tidak sesuai kebutuhan BKKBN Provinsi Jambi sehingga persediaan tidak digunakan dan terjadi penumpukan alokon di gudang yang mengakibatkan persediaan alat dan obat kontrasepsi menjadi kadaluarsa. Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi pada BKKBN Provinsi Jambi sehingga penelitian ini ingin menganalisis pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi pada perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap kegiatan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi khususnya kegiatan yang berhubungan dengan sistem sediaan alat dan obat kontrasepsi. Oleh karena itu hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku pada data Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi yang diteliti.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi yang beralamat di JL. R. Moh. Nuradma Dibrata, No. 19, Telanai Pura, Buluran Kenali, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361. Objek penelitian ini adalah pengendalian intern atas sediaan alat dan obat kontrasepsi di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Data digunakan untuk memberikan informasi di dalam menjawab permasalahan pengendalian intern sediaan alat dan obat kontrasepsi yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber asli dan diperoleh secara langsung sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini adalah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data Data Primer

Data primer didapatkan dari kuesioner. Peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis mengenai aspek-aspek sistem dan masalah unsur pengendalian intern yang ditujukan kepada pihak terkait. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala Guttman. Pilihan jawaban yang diberikan adalah “Ya” dan “Tidak”. Setiap pertanyaan apabila menjawab “ya” mendapat skor yakni 1. Setiap pertanyaan apabila menjawab “tidak” mendapat skor yakni 0.

3.5. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi berupa dokumentasi serta arsip-arsip laporan dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang bertujuan untuk mendapatkan data berbentuk tulisan atau gambar dengan melihat dokumen, catatan dan formulir yang digunakan di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan sistem persediaan di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi.

3.6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Untuk menentukan besarnya sampel apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya disebut penelitian populasi (Arikunto, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan dengan pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi yang berjumlah 64 orang. Responden penelitian ini berjumlah 30 orang.

3.7. Teknik Pengujian Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrument pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 2016) Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2016). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

b. Uji Reprodusibilitas

Koefisien ini merupakan suatu besaran yang mengukur derajat ketepatan alat ukur yang dibuat yang dalam hal ini daftar pertanyaan. Rumusnya:

$$K_r = 1 - \frac{e}{n}$$

Keterangan:

K_r = Koefisien Reprodusibilitas
 e = Jumlah eror
 n = Total kemungkinan jawaban

c. Uji Skalabilitas

Koefisien skalabilitas merupakan skala yang mengukur apakah penyimpangan pada skala reproduksibilitas masih dalam batas-batas yang dapat di tolerir, dengan rumus:

$$K_s = 1 - \frac{E}{P}$$

Keterangan:

K_s = koefisien Skalabilitas
 E = jumlah eror
 P = jumlah kesalahan

d. Uji Reliabilitas

Tujuan utama uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2016). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan KR 20 (Kuder Richardson), adapun rumusnya adalah:

$$r_i = \frac{\sum p_i q_i}{s}$$

Keterangan:

k = jumlah item dalam instrumen
 p_i = proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1
 q_i = $1 - p_i$
 s = varians total

Arikunto (2013:122) menentukan reliabilitas menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Reliabilitas

Koefisien reliabilitas	Kriteria
0,00 – 0,20	Sangat rendah
0,20 – 0,40	Rendah
0,40 – 0,60	Cukup
0,60 – 0,80	Tinggi
0,80 – 1,00	Sangat tinggi

Sumber: Arikunto (2013)

3.8. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2007). Hasil analisisnya merupakan komparasi antara teori pengendalian intern sediaan obat dan alat kontrasepsi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Keterkaitannya dengan Peraturan Pemerintah karena menganalisis institusi pemerintah yaitu Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi.

3.9. Skala pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran Gutman yang berbentuk jawaban ya atau tidak (dua pilihan jawaban). Jawaban ya memiliki nilai 1 dan jawaban tidak memiliki nilai 0.

4. HASIL

4.1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrument pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 2016). Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2016). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji reproduisibilitas dan skalabilitas.

4.2. Uji Reproduisibilitas

Uji reproduisibilitas digunakan untuk mengukur derajat ketepatan pertanyaan yang telah dibuat. Menurut Usman Rianse dan Abdi (2008) Koefisien Reproduisibilitas dengan ketentuan $Kr > 0,90$ dianggap baik untuk digunakan. Rumusnya:

$$Kr = 1 - \frac{e}{n}$$

Keterangan:

Kr = Koefisien Reproduisibilitas

e = Jumlah eror dihitung dengan pendekatan Goodenough dimana error merupakan jawaban tidak dalam kuesioner yang berjumlah 37

n = Total kemungkinan jawaban (jumlah responden x jumlah pernyataan)

= 30 responden x 26 pernyataan

= 780

r —

Hasil perhitungan uji koefisien reproduisibilitas menunjukkan hasil Kr sebesar $0,92 > 0,90$ yang berarti kuesioner dianggap baik.

4.3. Uji Skalabilitas

Koefisien skalabilitas digunakan untuk mengukur apakah penyimpangan pada skala reproduisibilitas masih dalam batas yang dapat ditolerir. Menurut Usman Rianse dan Abdi (2008) skala yang memiliki nilai $Ks > 0,60$ dianggap cukup baik. Rumusnya:

$$Ks = 1 - \frac{e}{P}$$

Keterangan:

Ks = koefisien Skalabilitas

e = Jumlah eror

P = $0,5 \times (\text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} - \text{jumlah pilihan jawaban})$

s

Hasil perhitungan uji koefisien skalabilitas menunjukkan hasil Ks sebesar $0,83 > 0,60$ yang berarti kuesioner dianggap baik.

4.4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2016).

$$\frac{\sum p_i q_i}{k}$$

Keterangan:

k = jumlah item dalam instrumen

p_i = proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1

$q_i = 1 - p_i$

s = varians total

$$s = \frac{\sum (r_i - \bar{r})^2}{n}$$

$$r_i = \frac{\sum p_i q_i}{e}$$

$$\bar{r} = \frac{\sum r_i}{n}$$

Hasil perhitungan uji koefisien reliabilitass menunjukkan hasil r_i sebesar 0,66659644 yang menunjukkan reliabilitas kuesioner dianggap tinggi karena r berada di antara 0,6 – 0,8 (sangat tinggi).

4.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat pengendalian intern atas alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN Provinsi Jambi yang terdiri dari lima indikator, meliputi lingkungan pengendalian,, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan pengendalian. Analisis data menggunakan Dean J Campion (1990:302) dalam Murniati (2018) sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah jawaban "ya"}}{\text{Jumlah total jawaban}} \times 100\%$$

a. Lingkungan Pengendalian

Jumlah jawaban “ya” pada lingkungan pengendalian berjumlah 143 sehingga persentase lingkungan pengendalian adalah sebesar

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{143}{160} \times 100\% \\ &= 88,57\% \end{aligned}$$

b. Penilaian Resiko

Jumlah jawaban “ya” pada penilaian resiko berjumlah 146 sehingga persentase lingkungan pengendalian adalah sebesar

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{146}{150} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

c. Informasi dan Komunikasi

Jumlah jawaban “ya” pada informasi dan komunikasi berjumlah 146 sehingga persentase lingkungan pengendalian adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{146}{147} \times 100\% \\ &= 99,33\% \end{aligned}$$

d. Aktivitas Pengendalian

Jumlah jawaban “ya” pada Aktivitas Pengendalian berjumlah 130 sehingga persentase lingkungan

pengendalian adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\ &= 98,33\% \end{aligned}$$

e. Pemantauan Pengendalian

Jumlah jawaban “ya” pada informasi dan komunikasi berjumlah 145 sehingga persentase lingkungan pengendalian adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\ &= 74,44\% \end{aligned}$$

Tabel 2. Penilaian Pengendalian Intern

No.	Keterangan	Persentase
1.	Lingkungan Pengendalian	88,57 %
2.	Penilaian Resiko	98,00 %
3.	Informasi dan Komunikasi	99,33 %
4.	Aktivitas Pengendalian	98,33%
5.	Pemantauan Pengendalian	74,44%
Rata-rata pengendalian intern		91,734 %

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jambi sebesar 91,734%.

5. PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi pada perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Pengendalian intern pada penelitian ini mengacu pada indikator pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jambi sebesar 91,734% dengan indikator tertinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 99,33% dan indikator terendah adalah pengawasan dan pemantauan sebesar 74,44%. Skor rata-rata pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi masuk dalam kategori sangat sesuai (76% - 100%) berdasarkan kriteria penilaian skala Guttman oleh Champion (1990). Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi sudah sangat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Lingkungan pengendalian atas alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi sudah sangat sesuai. Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi telah memiliki struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Metode penilaian persediaan alat dan obat kontrasepsi juga telah sesuai dengan akuntansi PSAK Nomor 14 tentang persediaan. BKKBN perwakilan Provinsi Jambi juga memiliki staf audit untuk guna meningkatkan kompetensi pegawai, BKKBN perwakilan Provinsi Jambi juga memberikan pelatihan.

Risiko merupakan unsur yang harus diwaspadai guna mengurangi tingkat kerugian pada alat dan obat kontrasepsi, sehingga BKKBN perwakilan Provinsi Jambi perlu melakukan penilaian risiko yang ada agar dapat melakukan kegiatan pencegahan risiko tersebut. BKKBN perwakilan Provinsi Jambi telah melakukan beberapa aktivitas pencegahan risiko seperti risiko kebakaran dengan menyediakan tabung pemadam kebakaran dalam upaya menghindari risiko kebakaran; risiko alat dan obat kontrasepsi rusak dan hilang dengan memiliki gudang khusus alat dan obat kontrasepsi yang kokoh, penerangan listrik yang

cukup, menggunakan AC, dan dilengkapi dengan sistem keamanan berupa pemasangan teralis dan kunci ganda, CCTV serta tenaga security yang terlatih; risiko selisih pada nilai persediaan alat dan obat kontrasepsi dengan melakukan stock opname setiap 6 bulan dan melakukan pencatatan dan pelaporan bulanan; risiko barang mutasi tanpa pengawasan dengan memberikan penanggung jawab pengeluaran alat dan obat kontrasepsi (sekretaris, bidang KBKR, dan pengelola gudang); risiko pelanggaran sistem akuntansi dengan melaksanakan perintah/instruksi pimpinan untuk melaksanakan rapat pengendalian program dan anggaran guna membahas program, kegiatan, anggaran dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi setiap bulan.

Aktivitas pengendalian pada alat dan obat kontrasepsi merupakan kesinambungan dari aktivitas penilaian risiko. Aktivitas pengendalian ditujukan untuk mengendalikan risiko yang telah diindikasikan pada aktivitas penilaian risiko dalam unsur pengendalian intern. Penerapan teknologi dalam aktivitas pengendalian alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi seperti penggunaan aplikasi pencatatan berbasis komputer, pemasangan kamera pengawas (CCTV), otorisasi pejabat penanggung jawab pada mutasi persediaan. Hal ini semua dilakukan untuk mengendalikan risiko yang terdeteksi.

Pengendalian yang telah diterapkan tentu perlu untuk dipantau dan dievaluasi melalui unsur pemantauan pengendalian. Langkah pemantauan pengendalian yang dilakukan oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jambi seperti adanya SOP atas setiap kegiatan pengendalian, adanya pembentukan tim stock opname yang melibatkan auditor. Unsur pemantauan mendapatkan penilaian yang paling rendah pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan adanya beberapa SOP terkait pemantauan persediaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya seperti monitoring tidak dilakukan oleh orang yang independen, dan tidak adanya inspeksi mendadak yang dilakukan pimpinan guna memastikan pengendalian internal telah berjalan dengan semestinya.

Unsur pengendalian intern pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi yang memiliki persentase penerapan tertinggi adalah informasi dan komunikasi. Hal ini menjelaskan bahwa dimensi informasi dan komunikasi merupakan dimensi yang penerapannya paling baik di antara dimensi pengendalian intern lainnya. Informasi dan komunikasi terkait alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi telah dilakukan dengan sangat baik. Ini terlihat dari informasi transaksi penerimaan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi yang dapat diakses kapan saja melalui aplikasi. Pencatatan persediaan akhir juga dilakukan setiap bulan. Data

transaksi yang telah terkomputerisasi memudahkan distribusi informasi ke pihak – pihak yang membutuhkan. Pengkomunikasian informasi alat dan obat kontrasepsi juga disampaikan setiap tanggal 5 bulan berikutnya ke BKKBN pusat secara online. Kondisi ini menjadi kekuatan dari pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi dari sisi informasi dan komunikasi di samping unsur pengendalian intern lainnya yang saling bersinergi menciptakan pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi yang efektif.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian, Sulindawati, dan Herawaty (2015) bahwa lingkungan pengendalian yang baik telah diterapkan pada RSUD Kabupaten Buleleng. Adanya suatu tes atau prosedur dalam perekrutan dan penerimaan pegawai yang sesuai dengan posisi, kedudukan serta kemampuan di masing-masing individu untuk menghasilkan suatu komitmen terhadap kompetensi yang efektif. Adanya struktur organisasi di RSUD Kabupaten Buleleng, khususnya bagian instalasi farmasi telah dirancang dan disusun dengan baik sesuai dengan unsur-unsur struktur organisasi meliputi spesifikasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, sentralisasi aktivitas, dan ukuran unit kerja. Telah adanya pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab, yang merupakan pengembangan dari struktur organisasi, yang secara garis besar diwujudkan dalam bentuk pemisahan fungsi-fungsi.

RSUD kabupaten buleleng telah melaksanakan penilaian resiko dengan cukup baik, dengan membuat suatu kebijakan stock opname yang dilakukan sekali dalam sebulan dengan menggunakan metode FIFO dan FEFO untuk memeperkecil resiko kadaluarsa obat. Informasi dan komunikasi yang dilaksanakan di RSUD kabupaten buleleng sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari penyusunan prosedur yang jelas termasuk prosedur pengawasan persediaan obat, khususnya untuk pasien pengguna BPJS Kesehatan, yang melibatkan beberapa fungsi terkait, dokumen dan catatan yang diperlukan serta laporan yang dihasilkan dan pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus di dasarkan atas laporan sumber yang dilampiri dengan

dokumen pendukung yang diotorisasi oleh pihak yang memiliki wewenang tersebut.

Aktivitas pengendalian di RSUD kabupaten buleleng sudah efektif dilaksanakan. Ini terlihat dari adanya laporan stock opname tiap bulannya, juga dapat dilihat dari pengelolaan informasi yang sudah berjalan dengan baik yaitu pengoperasian fasilitas pengolahan data dengan menggunakan sistem manual dan sistem komputer. Penyimpanan dokumen dan catatan penting di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Buleleng khususnya bagian instalasi farmasi disimpan di lemari di setiap bagian tertentu untuk dokumen 1 atau dokumen yang lainnya. Pemantauan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan secara rutin pelaksanaan kerja dari fungsi-fungsi yang terkait yang dilakukan oleh bagian gudang dan bagian pengadaan perlengkapan apabila adanya pemesanan dari pihak gudang akan dilaksanakan oleh pihak pengadaan perlengkapan untuk memesan obat yang diperlukan oleh pihak gudang. Pemantauan atas persediaan obat untuk pasien pengguna BPJS Kesehatan secara khusus meliputi penilaian dan penganalisaan laporan stock opname setiap bulannya.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern yang telah dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi telah sangat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mencakup seluruh unsur pengendalian intern meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada subjek yang diteliti, dimana penelitian ini hanya terbatas pada pengendalian intern yang dilaksanakan oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jambi, sehingga hasil penelitian ini terbatas apabila digeneralisasikan pada institusi lainnya.

Berdasarkan berbagai keterbatasan penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, diharapkan agar tetap mempertahankan dan meningkatkan pengendalian intern seperti yang ada sekarang sehingga memberikan hasil yang memuaskan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga BKKBN Provinsi jambi agar lebih memperhatikan persediaan alat/obat kontrasepsi di gudang untuk menghindari menumpuknya alat/obat kontrasepsi dan juga menghindari masa kadaluarsa alat/obat kontrasepsi.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi untuk mendukung penelitian sejenis. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan subjek penelitian lainnya yang dirasakan berisiko agar dapat dilakukan pencegahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta
- Arini, dkk. 2015. *Analisis Pengendalian Intern Terhadap Persediaan Obat Untuk Pasien Pengguna Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Di Rsud (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Buleleng*. Vol. 3 No. 1
- Hery. 2014. *Accounting Principles*. Jakarta: PT Grasindo
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK Nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, dan Supomo.2016.*Metodologi Penelitian Bisnis*.Yogyakarta. ISBN 978-979-29- 6684-8
- Maruf, dkk. 2019. *Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat Pada Organisasi Sektor Publik Di Puskesmas Bahu*. Jurnal EMBA Vol.7 No.3
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan keempat. Jakarta: Salemba Empat.

- Murniati, Eddy Soegiato, dan Ivana Nina Esterlin Barus. 2018. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Obat di Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis*.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rahayu, Irna Dwi. 2017. *Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Persediaan Obat Di Rumah Sakit Anak Astrini Wonogiri*. Jurnal Ekonomi Paradigma. ISSN : 1693-0827
- Rahayu, dkk. 2016. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Obat Di Rumah Sakit Anak Astrini Wonogiri*. Seminar Nasional IENACO. ISSN: 2337-4349
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, dkk. 2015. *Analisis Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan Prosedur Persediaan Obat- Obatan Pada Rumah Sakit PHC Surabaya*. ISSN: 2460-7762
- Sari, Petty Aprilia. 2013. *Analisis Pengendalian Intern Persediaan Obat-obatan Untuk Pasien Umum di Klinik IBUMAS Tanjung Pinang*.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2015. *Metodologi untuk Bisnis (Research Methods For Business)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 2013. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sumiyati, Lydia. 2011. *Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Obat Pada Rumah Sakit Panti Secant Gisting*. ISSN: 2086-9592. Vol. 2 No. 2
- Tunggal, Amin Widjaja. 2010. *Teori dan Praktek Auditing*. Jakarta: Havarindo.
- Utami, dkk. 2017. *Analisis efektivitas sistem pengendalian intern persediaan obat di rumah sakit umum kasih ibu Surakarta*. ISSN: 2337-4349